

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu pilar utama dalam mempercepat pertumbuhan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara individu berinteraksi, melainkan juga merevolusi sektor Pendidikan, Kesehatan, layanan keuangan dan partisipasi ekonomi secara luas (World Bank, 2017). Menurut laporan International Telecommunication Union (ITU, 2024), jumlah pengguna internet global telah mencapai lebih dari 5,4 miliar orang atau sekitar 67% dari populasi dunia, menunjukkan tren adopsi teknologi digital yang semakin masif di berbagai belahan dunia. Sebaran jumlah ini dapat kita lihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Tren Pertumbuhan Pengguna Internet Global (2017–2024)

Tahun	Jumlah Pengguna Internet Global	Persentase dari Populasi Dunia
2017	3,5 miliar	46%
2020	4,5 miliar	59%
2022	5,1 miliar	65%
2024	5,4 miliar	67%

Sumber : ITU (2024)

Pada konteks ini, inklusi digital yang mencakup akses terhadap infrastruktur internet, literasi digital, keterjangkauan biaya serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam ekosistem digital telah menjadi indikator penting dalam mengukur kesenjangan dalam sosial dan ekonomi moderen (Reisdorf & Rhinesmith, 2020). Inklusi digital berperan secara langsung dalam proses mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ketimpangan akses terhadap ekonomi, Pendidikan dan layanan publik (World Bank, 2017).

Namun meskipun adopsi teknologi global meningkat, kesenjangan digital tetap menjadi salah satu tantangan besar, terutama di negara berkembang. Kesenjangan

digital (*Digital divide*) tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan akses fisik terhadap koneksi internet, melainkan juga oleh faktor sosial seperti tingkat pendapatan, Tingkat Pendidikan, usia dan Lokasi geografis (Reisdorf & Rhinesmith, 2020). Di negara-negara berkembang, kesenjangan ini cukup tajam, hal ini menciptakan lapisan baru yang membatasi partisipasi dalam era ekonomi digital (ITU, 2024).

Akses internet telah menjadi kebutuhan fundamental dalam kehidupan modern karena perannya yang signifikan dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang akan menghadapi masalah yang serupa. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024), Tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5%, setara dengan 221 juta pengguna. Meskipun angka ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar, distribusi akses internet masih sangat timpang, dengan konsentrasi tinggi di wilayah perkotaan besar seperti DKI Jakarta, Surabaya, dan Bandung, sementara wilayah pedesaan dan kawasan padat di pinggiran kota mengalami keterbatasan akses yang akut (APJII, 2024).

Tabel 1. 2 Penetrasi Internet Indonesia Berdasarkan Wilayah (2024)

Wilayah	Tingkat Penetrasi Internet (%)
DKI Jakarta	95%
Jawa Barat	83%
Jawa Tengah	76%
Kalimantan	68%
Sulawesi	65%
Papua	52%

Sumber : APJII (2024)

Salah satu permasalahan yang menonjol di kawasan perkotaan, khususnya di Jabodetabek adalah keterbatasan infrastruktur dengan jaringan di daerah padat penduduk dan pemukiman yang sulit di akses (gang-gang). Struktur bangunan yang tidak teratur, Tingkat kepadatan yang cukup tinggi dan rendahnya potensi

keuntungan investasi membuat Internet Service Provider (ISP) besar enggan memperluas jaringan mereka ke wilayah-wilayah ini (Kominfo, 2023). Hal ini menyebabkan Sebagian Masyarakat di lingkungan tersebut bergantung pada layanan data seluler yang mahal dan tidak stabil bahkan beberapa area tidak memiliki akses internet karena terganggu oleh bangunan-bangunan yang ada.

Ketiadaan akses internet yang stabil di lingkungan padat penduduk berimplikasi serius terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Studi yang dilakukan Mckinsey (2017) menunjukkan bahwa keterbatasan akses internet berbanding lurus dengan keterbatasan akses Pendidikan daring, peluang usaha di bidang digital serta keterlibatan dalam layanan pemerintah secara daring. Ketimpangan ini memperparah marginalisasi kelompok Masyarakat berpenghasilan rendah di kota-kota besar.

Dikawasan padat penduduk seperti Jabodetabek, masih ada kesenjangan akses internet yang cukup signifikan, terutama pada wilayah gang sempit, pemukiman informal dan daerah padat penduduk yang sulit dijangkau oleh ISP resmi dan dinilai kurang menguntungkan secara komersil (Kominfo, 2021).

Sekalipun terjangkau, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap terdampak. Hal ini dikarenakan biaya langganan ISP besar seperti IndiHome memiliki biaya Rp 280.000 per bulan, jika kita bandingkan dengan rata gaji Rp 8.660.000 (Numbeo, 2024) akan mencapai 3.2% dari total pendapatannya. Namun bagi keluarga dengan pendapatan Rp 2-3 juta perbulan, pengeluaran ini cukup besar, mencapai 9-14% dari total pendapatan bulanan. Hal ini belum termasuk biaya instalasi awal dan syarat kontrak layanan yang semakin membebani (OJK, 2020; APJII, 2024).

Dalam menghadapi hal ini, muncul lah fenomena RT/RW Net sebagai salah satu Solusi berbasis komunitas yang menawarkan akses internet murah, stabil dan fleksibel di kasawan padat penduduk. RT/RW Net adalah jaringan lokal yang di kelola oleh komunitas.

Di berbagai wilayah padat penduduk Jabodetabek seperti Tambora, Koja, Cengkareng, dan Bekasi Utara, terdapat fenomena penggunaan jaringan internet lokal berbasis komunitas. Jaringan ini tumbuh di lingkungan-lingkungan yang sulit

dijangkau oleh layanan ISP komersial besar, terutama di kawasan gang sempit dan padat penduduk. Warga secara mandiri menarik kabel atau membangun jaringan wireless dari satu titik koneksi utama dan membaginya ke puluhan rumah lain dalam satu RT atau RW (Sah!, 2023; Kompas, 2024).

Dengan model bisnis yang cukup sederhana dan cukup beragam, salah satunya yaitu membeli satu koneksi utama (*Backbone*) dari ISP resmi, kemudian membaginya kembali melalui kabel LAN atau jaringan wireless kepada pengguna di lingkungan sekitar. Biaya yang dikenakan kepada pengguna biasanya jauh lebih murah dibandingkan yang berlangganan secara individu ke ISP, dengan kuota yang tak terbatas (Darmawan, 2021). Berikut merupakan perbandingan jaringan komunitas dengan ISP komersial yang akan dijelaskan di tabel 1.5

Tabel 1. 3 Perbandingan Jaringan Komunitas vs ISP Komersial

Aspek	Jaringan Komunitas (RT/RW Net)	ISP Komersial Resmi
Biaya Layanan	Relatif murah	Cenderung mahal
Cakupan Area	Terfokus di komunitas lokal	Lebih luas, tapi pilih-pilih area
Fleksibilitas	Tinggi, adaptasi cepat	Rendah, regulasi ketat
Legalitas	Umumnya tidak berizin	Resmi berizin

Sumber : djppi kominfo (2021)

Jaringan komunitas seperti RT/RW Net memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari ISP komersial resmi. Dari segi biaya layanan, RT/RW Net umumnya menawarkan harga yang relatif lebih murah, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara ISP komersial cenderung menetapkan tarif yang lebih tinggi. Cakupan area RT/RW Net biasanya terbatas pada lingkungan komunitas lokal, namun justru memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan responsif, berbeda dengan ISP resmi yang memiliki jangkauan lebih luas tetapi sering kali hanya melayani area yang dianggap menguntungkan secara bisnis. Dalam hal fleksibilitas, RT/RW Net lebih adaptif terhadap kebutuhan

warga karena tidak terikat banyak regulasi sedangkan ISP resmi umumnya memiliki fleksibilitas rendah karena memiliki regulasi ketat. Dari sisi legalitas, RT/RW Net sering kali beroperasi tanpa izin resmi, sementara ISP komersial telah memiliki legalitas yang diakui oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2024 oleh APJII, tercatat bahwa 14,68% responden memilih menggunakan penyedia layanan internet tidak resmi atau ilegal seperti RT/RW Net dengan alasan harga yang lebih murah, sementara 85,32% lainnya tetap menggunakan penyedia resmi meskipun tarifnya lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan akses yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana sebagian masyarakat lebih memilih alternatif layanan berbasis komunitas karena dinilai lebih terjangkau. Meskipun survei tidak mencantumkan angka pasti mengenai besarnya penurunan harga dari data tarif bulanan menunjukkan bahwa RT/RW Net kemungkinan besar menawarkan layanan internet dengan harga 50–70% lebih murah dibandingkan penyedia komersial besar seperti Telkom atau First Media, yang umumnya membebankan biaya langganan di atas Rp 200.000 per bulan.

Dampak sosial ekonomi dari kehadiran RT/RW Net di Kawasan padat penduduk tidak dapat diabaikan. Berdasarkan teori *Community-Driven Digital Inclusion* (CDDI) yang dikembangkan Rey-Moreno et al. (2017), inisiatif komunitas dalam membangun akses internet tidak hanya untuk memperluas koneksi, tetapi juga sebagai katalisator pembangunan sosial. Studi Liu et al. (2021) dalam *Frontiers in Psychology* menunjukkan bahwa adaptasi terhadap ekonomi digital berbasis komunitas meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat, memperluas akses terhadap layanan keuangan formal, serta mempercepat pertumbuhan usaha kecil dan mikro.

Salah satu keberhasilan penerapan pendekatan serupa dapat ditemukan dalam studi tentang inklusi digital di kalangan pengungsi baru di Australia selama pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Baganz et al. (2024). Studi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap internet melalui model berbasis komunitas memungkinkan para pengungsi untuk mempertahankan koneksi sosial, mengakses

layanan Kesehatan secara daring, serta mengikuti Pendidikan daring meskipun dalam kondisi pembatasan sosial yang ketat.

Lebih jauh lagi, dari data studi Salman dan Ismael (2023) mengenai inklusi keuangan digital di Mesir menunjukkan bahwa peningkatan akses digital di komunitas berbasis lokal tidak hanya memperluas partisipasi ekonomi Masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon melalui adopsi transaksi keuangan berbasis teknologi.

Di Indonesia, meskipun RT/RW Net telah terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam menjembatani kesenjangan akses internet, sebagian besar keberadaannya belum memiliki legalitas yang jelas. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No.13 Tahun 2019, setiap penyelenggara layanan internet publik wajib terdaftar resmi sebagai Penyelenggara Jasa Internet (ISP) (Kominfo, 2023). Namun, banyak RT/RW Net—terutama yang beroperasi di kawasan padat seperti gang-gang sempit di Jabodetabek—belum terdaftar, sehingga diklasifikasikan sebagai ilegal secara hukum.

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), terdapat sekitar 50.000 unit penyedia RT/RW Net ilegal yang secara kolektif melayani ratusan bahkan sampai jutaan pengguna di Indonesia, terutama dari kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh ISP besar. Data Kominfo menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, lebih dari 97 unit RT/RW Net ilegal teridentifikasi hanya di wilayah Pulau Jawa, dengan konsentrasi tinggi di Jabodetabek. Kondisi ini menandakan bahwa jaringan ilegal telah berkembang luas sebagai respons atas terbatasnya jangkauan dan biaya tinggi layanan internet resmi di wilayah padat penduduk.

Status ilegal ini membawa berbagai risiko, baik bagi pengelola maupun pengguna, antara lain potensi penertiban administratif, ketiadaan standar mutu layanan, lemahnya perlindungan data konsumen, serta ketidakpastian hukum. Studi oleh Chen et al. (2023) memperingatkan bahwa tanpa kepastian hukum, jaringan komunitas semacam ini sulit berkembang dan justru memperlebar kesenjangan digital. Selain itu, pelaku ilegal rentan menghadapi sanksi administratif, pemutusan

akses, penyitaan perangkat, bahkan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar.

Kebutuhan untuk menerapkan model jaringan komunitas ini juga sejalan dengan salah satu agenda nasional transformasi digital Indonesia 2045, yang mana menargetkan inklusi digital untuk seluruh warga negara (Kominfo, 2023). Untuk mencapai target tersebut, model pembangunan berbasis komunitas seperti RT/RW Net harus diakui, dikembangkan, dan diintegrasikan secara resmi dalam strategi nasional.

Selain memberikan kontribusi dalam aspek ekonomi, kehadiran RT/RW Net juga berdampak signifikan terhadap dinamika sosial di tingkat komunitas. Akses internet yang lebih luas mendukung masyarakat untuk memperkuat jaringan sosial, memperluas hubungan antarwarga, serta meningkatkan partisipasi dalam berbagai kegiatan sosial berbasis daring. Menurut penelitian Andrade dan Doolin (2016), konektivitas digital memperbesar peluang bagi komunitas lokal untuk memperkuat kohesi sosial melalui media sosial, forum diskusi daring, dan lainnya.

Dalam konteks kawasan padat penduduk, di mana interaksi sosial sehari-hari sering kali terjadi secara informal di ruang-ruang publik secara terbatas, kehadiran jaringan internet komunitas menciptakan bentuk baru dari interaksi sosial digital yang memperkaya hubungan sosial yang ada. Studi Baganz et al. (2024) menunjukkan bahwa penggunaan platform digital untuk mempertahankan koneksi sosial berdampak positif terhadap kesejahteraan psikososial individu dan keluarga, bahkan dalam kondisi keterbatasan mobilitas.

Akses internet yang stabil dari RT/RW Net juga membuka peluang peningkatan literasi digital masyarakat. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan dasar menggunakan perangkat, tetapi juga melibatkan pemahaman terhadap keamanan data, data privasi, serta penggunaan teknologi secara produktif untuk pembelajaran dan pengembangan ekonomi. Liu et al. (2021) menegaskan bahwa keberhasilan adaptasi terhadap ekonomi digital berbasis komunitas sangat bergantung pada tiga pilar utama: infrastruktur akses, literasi digital, dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam pengamatan terhadap beberapa komunitas RT/RW Net di kawasan Jabodetabek, terlihat bahwa pengelola jaringan tidak hanya menyediakan akses

internet, tetapi juga berperan sebagai edukator informal dalam meningkatkan keterampilan digital dasar masyarakat. Aktivitas seperti membantu pengguna mengatur router, mengajarkan penggunaan aplikasi pembayaran digital, hingga memperkenalkan konsep keamanan jaringan, telah menjadi praktik sehari-hari yang memperkaya kompetensi teknologi warga.

Namun, pertumbuhan jaringan komunitas ini juga membawa tantangan baru terkait keamanan jaringan. Tanpa standar keamanan minimum, RT/RW Net rentan terhadap serangan siber, pelanggaran data privasi, serta penyalahgunaan jaringan untuk aktivitas ilegal. Emmer et al. (2020) memperingatkan bahwa jaringan komunitas di negara-negara berkembang sering kali memiliki kelemahan struktural dalam hal enkripsi data, otentikasi pengguna, serta manajemen data privasi, yang dapat membahayakan baik pengelola maupun pengguna.

Beberapa model pengelolaan jaringan komunitas berhasil mengatasi tantangan ini melalui pendekatan berbasis komunitas yang terstandarisasi. Misalnya, jaringan guifi.net di Spanyol menerapkan protokol keamanan berbasis komunitas dan mekanisme governance berbasis kooperasi, yang berhasil mempertahankan pertumbuhan jaringannya menjadi lebih dari 38.000 node aktif pada tahun 2022 (Baig et al., 2022). Studi kasus ini menunjukkan bahwa skala besar tidak menghalangi model jaringan komunitas untuk mengadopsi hal ini.

Sebagai perbandingan, *Community Network Initiative* di Afrika Selatan yang didokumentasikan oleh Rey-Moreno (2017) menunjukkan bahwa model pelatihan keamanan daring berbasis *peer-to-peer* dalam komunitas mampu meningkatkan ketahanan digital komunitas rentan terhadap serangan siber sebesar 40% dalam dua tahun pertama operasional jaringan.

Namun demikian, agar potensi ini dapat direalisasikan, diperlukan langkah strategis untuk membangun ekosistem RT/RW Net yang berkelanjutan. Dalam rangka membangun ekosistem RT/RW Net yang berkelanjutan, beberapa tantangan utama harus diatasi.

Pertama, terkait aspek legalitas. Diperlukan kerangka regulasi nasional yang memungkinkan jaringan komunitas mendapatkan pengakuan hukum dengan prosedur yang sederhana, transparan, dan terjangkau, tanpa membebani mereka

dengan persyaratan administratif yang berat sebagaimana diterapkan kepada penyedia layanan komersial berskala besar. Inisiatif seperti hybrid licensing yang diusulkan ACM SIGCOMM (2022) dapat menjadi saran dalam merancang model regulasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik komunitas.

Kedua, peningkatan standar teknologi dan keamanan. Dukungan teknis dari pemerintah atau pihak ketiga independen sangat diperlukan untuk membantu RT/RW Net dalam mengadopsi protokol keamanan minimum, pengelolaan bandwidth yang adil (fair use policy), hingga sistem pelaporan insiden keamanan siber. Pengalaman jaringan guifi.net (Baig et al., 2022) membuktikan bahwa penerapan standar minimum keamanan dapat dilakukan secara kolaboratif tanpa mengorbankan sifat komunitas dari jaringan tersebut.

Ketiga, penguatan model bisnis berkelanjutan. RT/RW Net perlu mengembangkan mekanisme finansial yang stabil, misalnya melalui model iuran berbasis skala rumah tangga, pengembangan layanan tambahan seperti CCTV komunitas, dan platform ekonomi lokal berbasis digital. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kemandirian finansial jaringan dalam jangka panjang.

Keempat, pengembangan kapasitas literasi digital masyarakat. Program pelatihan yang fokus pada pengguna akhir, pengelola jaringan, serta penguatan kapasitas manajemen komunitas harus diintegrasikan. Program berbasis peer-to-peer seperti yang diterapkan dalam Community Network Initiative di Afrika Selatan (Rey-Moreno, 2017) terbukti efektif dalam mempercepat adopsi teknologi serta meningkatkan ketahanan digital komunitas.

Kelima, pentingnya sinergi antara komunitas dan pemerintah daerah. Pemerintah lokal dapat berperan sebagai fasilitator dalam mendukung pengembangan jaringan komunitas, baik melalui penyediaan akses ke infrastruktur pasif (seperti tiang listrik dan saluran kabel bawah tanah) maupun dengan memberikan dukungan regulasi ringan dan program literasi digital lokal.

Dalam kerangka ini, model Community-Driven Digital Inclusion (CDDI) tidak lagi sekadar pendekatan alternatif, melainkan telah menjadi kebutuhan strategis untuk mempercepat tercapainya tujuan inklusi digital nasional yang luas dan berkeadilan. Sebagaimana disimpulkan oleh Alencar (2020) dalam studinya tentang

digital inclusion for refugees, pemberdayaan komunitas lokal melalui pembangunan kapasitas teknologi dan infrastruktur digital adalah strategi kunci dalam memastikan keberlanjutan transformasi sosial ekonomi di era digital.

Dengan demikian, penelitian tentang peran RT/RW Net dalam membentuk dinamika sosial ekonomi masyarakat di kawasan padat penduduk menjadi sangat penting. Pemahaman yang mendalam terhadap kontribusi, tantangan, serta peluang dari jaringan berbasis komunitas ini akan menjadi dasar yang kuat dalam merancang kebijakan publik yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis pada realitas kebutuhan masyarakat urban.

Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap literatur akademik mengenai jaringan komunitas dan inklusi digital, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh pembuat kebijakan, pengelola jaringan, komunitas lokal, serta pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pembangunan ekosistem digital Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Oleh karena itu, dalam konteks urgensi inilah penelitian ini disusun, dengan harapan dapat memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena RT/RW Net serta peran strategisnya dalam mempercepat inklusi digital dan transformasi sosial ekonomi masyarakat di kawasan padat penduduk di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan ada ketergantungan masyarakat terhadap akses internet, baik untuk kebutuhan pendidikan, ekonomi maupun sosial telah melahirkan berbagai inisiatif lokal dalam menyediakan layanan konektivitas digital secara mandiri. Salah satu bentuk nyata dari inisiatif ini adalah jaringan internet berbasis komunitas yang dikenal dengan istilah RT/RW Net. Jaringan ini terdapat di kawasan padat penduduk yang tidak terjangkau oleh ISP komersial, dan telah menjadi infrastruktur digital utama bagi banyak warga.

Meski memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat, RT/RW Net secara hukum dikategorikan ilegal, karena sebagian besar tidak memiliki izin resmi

dari Kominfo sebagai penyelenggara layanan internet. Kondisi ini menciptakan kontradiksi tajam antara kebutuhan nyata masyarakat dan batasan regulasi negara.

Relevansinya muncul karena jaringan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dalam mengakses pendidikan daring, layanan pemerintah, transaksi digital dan peluang pekerjaan informal. Sementara itu, dampaknya dapat signifikan terhadap arah kebijakan inklusi digital nasional ke depan khususnya jika model seperti ini terbukti efektif dalam mendorong pembangunan digital berbasis komunitas. Hal ini menimbulkan sebuah kontradiksi antara kebutuhan Masyarakat dengan regulasi yang ada. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kontribusi dari jaringan internet ilegal (RT/RW Net) terhadap sosial dan ekonomi terhadap masyarakat?
2. Apa yang memotivasi Masyarakat dalam memilih RT/RW Net dibandingkan penyedia layanan resmi?
3. Bagaimana peran model *Community-Driven Digital Inclusion* (CDDI) dapat digunakan untuk memahami dan merekognisi kontribusi jaringan internet ilegal terhadap Pembangunan digital Masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dan peran jaringan internet ilegal (RT/RW Net) berbasis komunitas terhadap kehidupan Masyarakat. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisa kontribusi sosial dan ekonomi dari keberadaan RT/RW Net terhadap kehidupan Masyarakat.
2. Mengidentifikasi alasan dan motivasi dari Masyarakat mengapa menggunakan RT/RW Net yang mana secara administrasi merupakan jaringan ilegal
3. Menganalisa RT/RW Net melalui pendekatan *Community-Driven Digital Inclusion* (CDDI) untuk memahami bagaimana jaringan ini berperan sebagai bentuk inklusi digital berbasis komunitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut

1. Aspek teoritis (keilmuan); penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman ilmiah dalam lingkup sosial dan ekonomi dalam bidang studi teknologi berbasis komunitas, khususnya dalam konteks akses digital di wilayah perkotaan yang masih kurang dilayani oleh ISP formal seperti gang gang sempit dan lingkungan padat penduduk.
2. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan padat yang selama ini sulit mengakses internet formal. Bagi pengelola RT/RW Net, hasil studi ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengelola jaringan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Bagi mahasiswa dan komunitas digital, temuan ini membuka ruang keterlibatan dalam pengembangan teknologi komunitas. Sementara bagi ISP resmi, penelitian ini menawarkan wawasan untuk merancang model bisnis atau kolaborasi baru yang lebih adaptif. Penelitian ini mendorong urgensi untuk mempertimbangkan legalisasi RT/RW Net sebagai strategi memperluas inklusi digital nasional secara realistis dan partisipatif.

